



Hlc. 04.01/270

**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BAPPENAS**

KEPUTUSAN

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR: KEP. 185 /M.PPN/05/2005**

TENTANG

**PENUNJUKAN DELEGASI INDONESIA DALAM NEGOSIASI PROYEK
*INDONESIA: MANAGING HIGHER EDUCATION
FOR RELEVANCE AND EFFICIENCY (I-MHERE)*
DENGAN BANK DUNIA**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi kompetisi global, kualitas pendidikan tinggi perlu ditingkatkan dan bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, otonomi pengelolaan perguruan tinggi merupakan pendekatan yang paling tepat guna memberi keleluasaan bagi perguruan tinggi dalam mengelola sumber daya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan perguruan tinggi yang otonom mensyaratkan tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas publik sehingga untuk itu diperlukan kebijakan, kerangka hukum dan peraturan perundangan-undangan, serta dukungan sumber daya finansial yang memadai;
 - c. bahwa sumber dana Pemerintah tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi, sehingga diperlukan dana yang berasal dari pinjaman luar negeri;
 - d. bahwa untuk mendapatkan pinjaman dana sebagaimana dimaksud pada huruf [c] di atas diperlukan Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi dengan Bank Dunia dengan susunan keanggotaan yang mencerminkan instansi terkait;
 - e. bahwa pejabat yang tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Delegasi Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen sebagaimana telah

diubah ...

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005;

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
4. Keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas Nomor 185/KMK.03/1995 dan Nomor 031/KET/5/1995 tentang Tatacara Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pemantauan Pinjaman/Hibah Luar Negeri dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENUNJUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELAKUKAN NEGOSIASI PROYEK *INDONESIA: MANAGING HIGHER EDUCATION FOR RELEVANCE AND EFFICIENCY (I-MHERE)* DENGAN PIHAK BANK DUNIA.**

PERTAMA : Menunjuk Delegasi Republik Indonesia untuk melakukan negosiasi Proyek *Indonesia: Managing Higher Education For Relevance and Efficiency (I-MHERE)* dengan Bank Dunia yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei di Jakarta yang terdiri atas Tim Delegasi dan Tim Teknis.

KEDUA : Dalam melakukan negosiasi, Delegasi Republik Indonesia harus berpedoman pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Di dalam melakukan negosiasi, semua pembahasan negosiasi baik menyangkut aspek teknis, aspek pendanaan, aspek pengelolaan maupun aspek-aspek lain yang terkait dengan proyek I-MHERE sebagaimana dimaksud di atas harus dilakukan untuk memberikan keuntungan bagi Negara dan harus menghindarkan kerugian dan atau potensi kerugian Negara;
- b. Rencana desain proyek yang dinegosiasikan harus dan sudah memenuhi kriteria-kriteria yang tercantum dalam *Country Portfolio Performance Review (CPPR)* 2002 khususnya mengenai Kriteria Kesiapan Proyek;

c. Untuk ...

- c. Untuk menjamin kelancaran implementasi proyek, pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek terutama pihak Pemerintah memberikan komitmen secara formal untuk menyediakan dana pendamping yang diperlukan pada setiap tahun anggaran.

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Delegasi terdiri atas:

1. Satryo Soemantri Brodjonegoro
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Sebagai Ketua merangkap anggota
2. Leila Retna Komala
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
dan Kebudayaan
Kantor Menneg PPN/Bappenas
Sebagai Anggota
3. Prasetyono Widjono MJ
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Kantor Menneg PPN/Bappenas
Sebagai Anggota
4. Achmad Rochyadi
Direktur Jenderal Anggaran dan
Perimbangan Keuangan
Departemen Keuangan
Sebagai Anggota
5. Mulia Nasution
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan
Sebagai Anggota
6. Nina Sardjunani
Direktur Agama dan Pendidikan,
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan
Kebudayaan
Kantor Menneg PPN/Bappenas
Sebagai Anggota
7. Delthy Simatupang
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral,
Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan
Kantor Menneg PPN/Bappenas
Sebagai Anggota
8. Dharma Bhakti
Direktur Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan
Sebagai Anggota
9. Tommy Ilyas
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Sebagai Anggota

10. Suwarsih ...

10. Suwarsih Madya Sebagai Anggota
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dan Humas
Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional

11. Soepeno Djanali Sebagai Anggota
Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Teknis yang bertugas membantu Tim Delegasi terdiri atas:

1. T. Basarudin Sebagai Ketua
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE merangkap anggota
2. Bagyo Y. Mulyodiharjdo Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
3. Abdul Malik Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
4. Djoko M. Hartono Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
5. Kharisun Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
6. Fitri Harto Sebagai Anggota
Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Departemen Keuangan
7. Biemo W. Sumardi Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
8. Rizal Tamin Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
9. Nizam Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
10. Bambang Budiyo Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
11. Emir Hadi Soeganda Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
12. Herman Susanto Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE
13. Dadang Sudyarto Sebagai Anggota
Tim Penyiapan Proyek I-MHERE

14. Emmy ...

14. Emmy Suparmijatun
Direktorat Agama dan Pendidikan
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
Kantor Menneq PPN/Bappenas
Sebagai Anggota
15. Sri Rahayu
Direktorat Agama dan Pendidikan
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
Kantor Menneq PPN/Bappenas
Sebagai Anggota
16. Amich Alhumami
Direktorat Agama dan Pendidikan
Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan
Kantor Menneq PPN/Bappenas
Sebagai Anggota

- KELIMA : Delegasi Republik Indonesia bertanggung jawab dan melaporkan hasil negosiasi Proyek *Indonesia: Managing Higher Education for Relevance and Efficiency* (I-MHERE) tersebut kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KEENAM : Segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan negosiasi Proyek *Indonesia: Managing Higher Education for Relevance and Efficiency* (I-MHERE) dibebankan kepada anggaran masing-masing instansi terkait.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai terselesaikannya negosiasi dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Mei 2005

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



DR. SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Keuangan
2. Menteri Pendidikan Nasional
3. Menteri Luar Negeri
4. Menteri Sekretaris Negara
5. Anggota Delegasi RI



SESMEN PPN/SESTAMA BAPPENAS

LEMBAR EDARAN

NOMOR AGENDA	DITERIMA TANGGAL	TINGKAT SURAT	DITERUSKAN KEPADA:
367/M	09/05/05	Rahasia/Penting/Biasa	Ibu Menteri

Aşal Surat :	RINGKASAN ISI SURAT/TANGGAPAN
Nomor :	
Perihal :	

DITERUSKAN KEPADA :	DISPOSISI
• Deputi : I, II, III, IV, V, VI, VII	Untuk dipergunakan
	Tanggapan
• Inspektur Utama	Untuk diketahui
	Untuk diselesaikan
• Sameneg : I, II, III, IV, V	Laporan/Laporkan
	Untuk mewakili
• Sekretariat Menneg PPN/Ka. Bappenas	
• Lainnya :	

• Uraian lengkap terlampir

Catatan/arahan:

Paper copy

09/05
05

[Signature]

Koensatwanto Inpasihardjo

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MEMORANDUM

KEPADA : Lth. Bapak Sesmen PPN | Sestama
DARI : Subrisno D
TANGGAL : 9 Mei 2015
PERIHAL : Konsep SK Menteri

Terlampir kami sampaikan konsep 3 buah
SK Menteri dan pengantarannya.

Moh tdk teranga Bapak.

